GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Media Indonesia **Tgl/Bln/Thn : 22/2/2005**

Subyek : **Hari : Selasa**

Kata Kunci : **Halaman :**

Membangun Lingkungan Pascatsunami

Rahmat Witoelar, Presiden GC/GMEF 2005-2007

NAIROBI (Media): Menteri Lingkungan Hidup Indonesia Rahmat Witoelar secara aklamasi terpilih sebagai Presiden Governing Council/Global Ministerial Environment Forum dalam sidang ke-23 Governing Council/Global Ministerial Environment Forum UNEP (United Nations Enviroment Programme) yang berlangsung di Nairobi, kemarin. Wartawan *Media* Siswantini Suryandari dari Nairobi melaporkan sebanyak empat grup yang terdiri dari Asia, Amerika (termasuk di dalamnya Amerika Selatan), Eropa, dan grup Afrika secara bulat memutuskan Rahmat Witoelar sebagai Presiden GC/GMEF 2005-2007 menggantikan Arcado Ntagazwa dari Tanzania yang sudah habis masa tugasnya.

Rahmat Witoelar memberikan kenang-kenangan berupa patung wayang golek Kresna kepada Arcado Ntagazwa yang disimbolkan sebagai orang bijaksana dan bekerja keras. Rahmat dalam pidato pembukaannya mengatakan banyak tantangan yang dihadapi masyarakat sekarang ini khususnya isu lingkungan sejak dilaksanakannya Millennium Development Goals (MDGs). "Kita menghadapi tantangan yang tinggi dari implementasi MDGs, sebuah keputusan internasional yang harus dilaksanakan sesuai target dan tujuan." Sejumlah isu yang diangkat saat ini, seperti pengurangan kemiskinan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pembangunan lingkungan berkelanjutan, lanjut Menteri LH, merupakan target yang harus dikerjakan dan selesai tepat waktu. Untuk itu, kata Rahmat, ia lebih berkonsentrasi pada situasi lingkungan di tingkat lokal nasional dan regional. Menurut Rahmat, lebih dari 30 tahun setelah konvensi Stockholm masalah lingkungan tetap menjadi isu penting dan terus-menerus diperjuangkan dan dipromosikan di setiap kesempatan. Ia menilai peran sebagai Presiden Governing Council dan Global Ministerial Environmental Forum sangat kuat dan strategis dalam memandu implementasi, akses, dan monitoring seluruh program UNEP. "Selain itu meningkatnya jumlah partisipan dalam forum ini menunjukkan semakin kuat indikasi setiap negara dan tanggung jawab kolektif untuk memperjuangkan isu lingkungan, ujar Rahmat. Rahmat juga menyatakan pula isu yang potensial saat ini adalah bagaimana memulihkan keadaan negara-negara terkena bencana tsunami termasuk Indonesia. Kerusakan lingkungan dan meningkatnya kemiskinan akibat bencana alam merupakan salah satu isu penting yang bisa dipecahkan solusinya oleh negara-negara anggota UNEP.

Bali Strategic Plan, lanjut Rahmat, merupakan sebuah kesepakatan bersejarah yang harus terus ditindaklanjuti. Dalam keputusan Bali Strategic Plan tahun lalu telah disepakati adanya transfer teknologi di bidang lingkungan, yang mana negara-negara berkembang masih jauh tertinggal. "Perlu menjadi perhatian pula, pembuangan limbah di perbatasan negara sangat merugikan. Demikian pula promosi produksi dan makanan yang berwawasan pembangunan berkelanjutan harus ditingkatkan."

Pasca tsunami

Sebelum acara pemilihan presiden didahului dengan pembukaan yang dihadiri Direktur Eksekutif UNEP Klaus Topfer, Direktur Eksekutif UN-Habitat Anna Tibaijuka, Presiden CG/CGMF 2003-2005 Arcado Ntagazwa, Zeng Peiyan wakil dari China dan Presiden Republik Kenya Mwai Kibaki. Topfer dalam sambutannya mengatakan saat ini hal terpenting yang dilakukan bagaimana mengatasi bencana tsunami dengan memberikan metode *early warning system*. "Tentu saja transfer teknologi yang ada disesuaikan dengan kapasitas negara masing-masing," kata Topfer. Adapun pembangunan berkapasitas yang menjadi prioritas UNEP pascatsunami, katanya, adalah rekonstruksi zona pesisir, pemetaan kerusakan area dan pembangunan kembali lokasi bencana dengan menggunakan cara pembangunan berkelanjutan. Kerusakan *mangrove,* hutan, vegetasi laut, karang maupun pencemaran air dan tanah juga menjadi salah satu program pemulihan. Diakui Topfer, dana UNEP tidaklah besar apalagi untuk merehabilitasi lingkungan pascatsunami, karena situasi keuangan UNEP sejak 1990 mengalami kesulitan. Topfer menyebutkan hingga 2004 UNEP telah memberikan bantuan dana untuk lingkungan di 114 negara. "Kita kalkulasi bujet selama 2004 sebesar US$55 juta. Bantuan yang sudah diberikan dan kini masih berjalan mencapai US$60 juta," jelas Topfer yang berharap bantuan tersebut bisa digunakan untuk pembangunan lingkungan sesuai dengan kebutuhan di setiap negara.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP